PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 20 November 2017 Halaman: 13

Empat Raperda Dipastikan Tak Selesai

YOGYA, TRIBUN - Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DIY 2017 dipastikan tidak sesuai target. Empat Raperda dari 16 Raperda dan Raperdais yang masuk Propemperda tahun ini, akan dilimpahkan ke tahun depan karena tidak bisa dibahas dan diselesaikan. Eksekutif dan legislatif pun telah sepakat soal ini.

Ketua Bapemperda DPRD DIY, Rendradi Suprihandoko mengatakan, empat Raperda tersebut adalah Raperda usulan dari eksekutif yakni Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kemudian Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri DIY, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu juga Raperda Revisi Kelembagaan Pemda DIY.

Perlu diketahui, Raperda Rencana Pembangunan Indusrti serta Raperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak bisa dibahas tahun ini karena Raperda

> Raperda RTRW itu untuk pembahasan membutuhkan persetujuan substansi dari Kementerian Tata Ruang di Jakarta.

● ke halaman 14

Empat Raperda Dipastikan Tak

● Sambungan Hal 13

RTRW belum jadi.

"Raperda RTRW itu untuk pembahasan membutuhkan persetujuan substansi dari Kementerian Tata Ruang di Jakarta, nah sampai sekarang meski Eksekutif aktif untuk mendapatkan itu sampai hari ini belum bisa," katanya.

Raperda Revisi Kelembagaan sebelumnya direncanakan dibahas pada akhir tahun ini, namun kareta keterbatasan waktu tidak bisa dilakukan. Sedangkan ada satu Raperda yang akhirnya tidak akan dilanjutkan yakni Raperda Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang inisiatornya Komisi A.

Untuk diketahui, dari 16 Reperda yang masuk Propemperda 2017 hingga akhir tahun ini baru enam yang sudah selesai dan menjadi Perda, sementara satu Raperda masih dalam fasilitasi dan empat Raperda akan diselesaikan akhir tahun ini.

Tahun depan direncanakan akan ada 15 Rapeda yang akan dibahas, selain empat limpahan dari tahun ini eksekutif mengusulkan enam Raperda baru. Sedangkan yang usulan legislatif ada lima Raperda yang berasal dari masing masing Komisi dan Bapemperda.

"Nanti pada 27 November kami akan menetapkan Propemperda 2018. Insya Allah sudah kita siapkan tinggal kami butuh dokumen resmi mengenai penyampaian masing masing Komisi karena yang masuk baru Komisi D. Dari kami ada lima dan dari eksekutif ada 10 raperda termasuk luncuran empat," katanya.

Ketika ditanya apakah tahun depan bisa sesuai target? mengingat tahun ini target tidak terpenuhi, Rendradi mengatakan memang ada penurunan dalam penyelesaian Raperda dimana dalam tahun pertama terpenuhi namun tidak selanjutnya. Kendala yang muncul dan menghambat antara lain adalah naskah akademik atau draft yang belum siap betul.

"Kami komisi dan Bapem lima (Raperda) itu Insya Allah sudah siap, jadi besok tingal *ngurutke* antre saja, yang siap mainkan, kami Insya Allah bisa selesai," katanya.

Sementara itu direncanakan untuk RJPMD 2018-2023 akan mulai pembahasan awal pada semester ini. Kemudian pada semester pertama tahun depan akan dibahas mengenai konten. Selain itu Raperda RTRW juga akan diprioritaskan dibahas pada awal 2018.

Dikebut 1,5 Bulan

Sebanyak empat rancangan peraturan daerah (Raperda) DIY akan dikebut penyelesaiannya dalam sisa waktu tahun ini atau sekitar 1,5 bulan. Ketua Bapemperda DPRD DIY, Rendradi Suprihandoko optimistis empat Raperda tersebut akan kelar tahun ini. "Kami targetkan selesai, kami berupaya keras untuk itu," kata Rendradi.

Empat Raperda tersebut adalah Raperda tentang pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam serta batuan, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraa Perlindungan Anak dan Raperdais tentang pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan.

Empat Raperda tersebut masih diproses dalam pansus. Sementara itu satu Raperda yakni tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi serta UMKM telah selesai pembahasan dan sudah diharmonisasi di Bapemperda.

"Sudah selesai dan sudah harmonisasi di Bapemperda dan kemudian kita minta fasilitasi di tingkat Kementerian, kita menunggu hasilnya," ujarnya.

Menurutnya untuk Perda yang sudah selesai untuk tahun ini berjumlah enam, dan akan ditambah Rapeda yang tengah difasilitasi di Kementerian dan menyusul empat yang sedang dibahas. Sehingga total jika semua selesai akhir tahun ini berjumlah 11 Perda.

Bisa dipastikan target program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) DIY 2017 tidak tercapai. Karena dari target 16 Rapeda dan Raperdais, hanya 11 yang sudah selesai dan masih dalam pembahasan. Sisanya disepakati akan dilanjutkan di tahun depan. **(dnh)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005